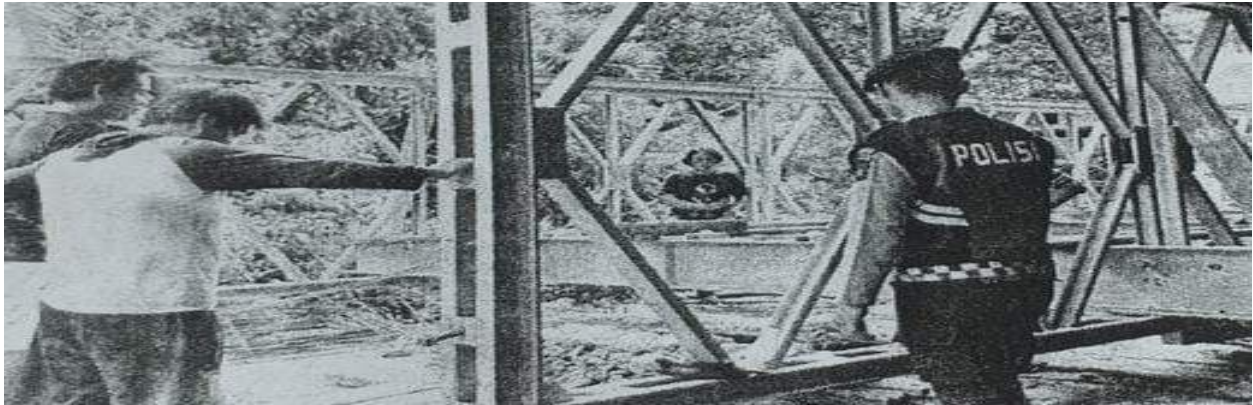


Dinas PUPR Maksimalkan Pembangunan Tiga Jembatan Bailey, Faktor Geografis Jadi Tantangan Utama



SUMBER : KORANKALTIM JUMAT, 21/02/2025

UJOH BILANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mahulu secara intensif menggenjot pembangunan tiga unit jembatan bailey yang berlokasi di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.

Ketiga jembatan strategis tersebut adalah Jembatan Sungai Tingang 1, Jembatan Sungai Tingang 2, serta jembatan yang berada di kawasan Polsek Long Bagun dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan memperbaiki infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagya menjelaskan, tiga jembatan ini harusnya telah rampung sejak lama tetapi tertunda karena adanya kendala teknis serta non-teknis. Namun, sekarang rangka jembatan beserta berbagai material konstruksi lainnya telah tersedia dan siap untuk dipasang.

"Pada saat ini, proses pekerjaan konstruksi sudah kembali berjalan dengan baik, mengingat seluruh material yang dibutuhkan untuk pembangunan juga telah tersedia di lokasi proyek," ungkap Didik Subagya saat ditemui, Kamis (20/2.).

Didik Subagya menuturkan, tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini adalah proses mobilisasi material ke lokasi pembangunan. Pengangkutan material konstruksi ini mayoritas harus dilakukan melalui jalur Sungai Mahakam.

"Selain itu, pada tahun lalu, terdapat rangkaian agenda nasional yang cukup padat, mulai dari Pilpres, Pileg, hingga Pilkada. Sehingga pelaksanaan proyek ini sempat mengalami pergeseran jadwal karena fokus untuk menyukseskan agenda tersebut," jelas Didik.

Dinas PUPR Mahulu memastikan pengerjaan pembangunan jembatan ini akan diselesaikan secepat mungkin agar masyarakat dapat segera menikmati manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mahulu.

Didik juga mengimbau kepada seluruh masyarakat setempat agar memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proyek ini, serta mematuhi instruksi terkait jalur alternatif yang telah ditetapkan selama proses pembangunan berlangsung.

"Saya berharap pembangunan ini dapat segera terselesaikan. Saat ini, yang tersisa hanyalah proses pemasangan akhir. Kendala utama yang perlu diperhatikan adalah sulitnya akses alat berat ke lokasi, mengingat letak jembatan berada di dalam area perkampungan," pungkasnya. **(jih1023/han/ga)**

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Dinas PUPR Maksimalkan Pembangunan Tiga Jembatan Bailey, Faktor Geografis Jadi Tantangan Utama, 21/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014) antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Urusan pemeritnahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan.
 - (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah perhubungan.
2. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

